

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA – MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN

**Ris Tendi Andika¹
NIM. 1302045063**

Abstract

Cooperation between the Republic of Indonesia and Malaysia is classified as bilateral cooperation, beside economic and social collaboration both of countries due to geographical proximity and the same security problem, which is drugs. Both of countries purpose to improve the security in the boundary region instead overcome the Distribution and Smuggling of the drugs. The research aims to explain how the cooperation between the government of the republic of Indonesia and Malaysia in overcoming the drugs problems in the boundary region. The research method in this thesis is descriptive with primary and secondary data. The analysis technique used is qualitative. Theories used are Interdependence and Bilateral Cooperation theories. The research results is government of the republic of Indonesia and Malaysia which was manifested through Memorandum of Understanding General Border Committee Malaysia – Indonesia (GBC Malindo) on the 15 standard operating procedure, through 2010 in Malaysia. A few of collaborations is surveillance Cooperation in maritime boundary between Malaysian Marine forced and Maritime Police Unit of Indonesia, collaboration of communication between Indonesia Police and PDRM, also collaboration in coordinating mainland surveillance between Sabah contingent and the East Borneo Regional Police. The points of the agreement underlie the cooperation of the Government of the republic of Indonesia with Malaysia to tackle the distribution of drugs in the boundary region both of the countries.

Keywords: Border, Drugs, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Munculnya kejahatan penyalahgunaan obat - obatan terlarang yang diperdagangkan secara illegal dan melewati batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara menjadi dampak negatif dari globalisasi. Salah satu regional yang terkena dampaknya adalah regional Asia Tenggara dan beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia dan Malaysia. Dalam mewujudkan kawasan yang terbebas dari permasalahan narkoba ASEAN membuat suatu kesepakatan dengan negara-negara anggotanya, yakni *Drug Free ASEAN 2015*. Untuk mewujudkan *Drug Free ASEAN* Indonesia mengambil langkah-langkah tindakan salah satunya yakni melakukan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : tendyrelote@gmail.com

kerjasama luar negeri dengan Negara Malaysia karena memiliki permasalahan yang sama dan juga letak geografis yang berdekatan.

Indonesia juga melakukan kerjasama kepada instansi atau lembaga-lembaga di Indonesia salah satunya adalah BNN dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Di Indonesia narkoba perlahan menyusup ke berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal usia tua atau muda. Berdasarkan data BNN pada tahun 2013, narkoba masuk ke berbagai jenjang usia. Peredaran narkoba mulai masuk ke kelompok usia dibawah 16 tahun sebesar 0,3%, kelompok usia 16-19 tahun sebesar 4,82%, kelompok usia 20-24 tahun sebesar 14,67%, kelompok usia 25-29 tahun sebesar 26,86%, dan kelompok usia diatas 30 tahun mencapai 53,35% (<https://indonesiana.tempo.co/article>).

Estimasi kebutuhan narkoba ilegal di Indonesia untuk narkoba jenis ganja 158 juta gram, Sabu 219 juta gram dan Ekstasi 14 juta butir. Dari data tersebut diatas, maka tidak heran jika Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkoba sindikat internasional untuk memproduksi narkoba dalam jumlah yang besar untuk dijual di Indonesia.

Indonesia juga menjadi sasaran ekspor utama bagi negara-negara produsen narkoba seperti Belanda dan Iran. Harga 1 butir ekstasi di Belanda Rp.3000.00 > Malaysia Rp.30.000.00 > Indonesia Rp.300.000.00 per butir. Sementara untuk sabu asal Iran, Rp.100 juta /kg > Malaysia Rp.300 juta /kg > Indonesia Rp.1,5 miliar /kg. (<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkoba>)Peningkatan harga narkoba yang terjadi saat tiba di Indonesia dikarenakan oleh beberapa hal seperti, biaya perjalanan dari Negara asal yang jauh dan mahal, tingkat keamanan yang harus di dapat oleh si kurir antar negara, tingkat resiko dalam perjalanan dari Negara asal yang di hadapi sangat besar, kualitas unggulan dari Negara asal, biaya mobilitas dalam mengedarkan sangat besar dan beresiko.

Indonesia dan Malaysia juga mengadakan kerjasama untuk menghadapi masalah *drugs trafficking* dengan cara melakukan pertukaran informasi guna pencegahan, penangkapan, dan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba. Perwujudan kerjasama Indonesia - Malaysia tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan MoU GBC Malindo (*General Border Commitee* Malaysia-Indonesia) tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kerjasama tersebut mempunyai beberapa bagian sebagai panduan kerjasama kepolisian kedua negara yaitu:

- a) Kerjasama pengawasan di perairan perbatasan antara Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM dan Polisi Air POLRI.
- b) Kerjasama bidang komunikasi antara PDRM dan POLRI.
- c) Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan POLDA Kalimantan Timur.
- d) Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sarawak dengan POLDA Kalimantan Barat.
- e) Kerjasama menangani tindak kriminal antara PDRM dan POLRI.

Kerjasama ini bertujuan untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik untuk mengamankan perbatasan darat maupun laut kedua negara sehingga terbebas dari kejahatan lintas negara. Penyelundupan narkoba serta peredaran di dalam negeri sangat berdampak terhadap perekonomian nasional, karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang ilegal dan tidak terekam di data negara. Kemudian peredaran narkoba juga menjadikan daya beli masyarakat menjadi menurun, karena para pecandu dan pengguna narkoba lebih memilih membeli narkoba dibanding membelanjakan uang yang transaksinya terekam oleh pihak Negara.

Para pengguna narkoba sebagian besar merupakan pemuda dan seharusnya pemuda adalah sebagai penopang hidup sebagai tulang punggung untuk meningkatkan perekonomian keluarga atau diri sendiri, dan karena narkoba para pemuda menjadi tidak produktif dan menjadikan diri sebagai sumber kriminal karena membutuhkan uang untuk membeli narkoba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN dan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017, survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba menyebutkan bahwa penyalahgunaan di Indonesia berjumlah 3.367.154 jiwa di kelompok usia 10-59 tahun atau dengan persentase 1,77% (Kusnowati, 2019: 17). Jumlah yang telah direhabilitasi adalah 16.554 Orang, dengan 9.280 terkena penyakit AIDS dengan persentase terbanyak pada kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 3.294 kasus dan kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 2.830. Data terakhir di tahun 2017 menyatakan bahwa telah terjadi 3.652 kasus yang meningkat sebesar 137,14% yaitu dari 1.540 kasus di tahun 2016. Akibat dari transaksi perdagangan narkoba ilegal, Indonesia memiliki potensi kehilangan pendapatan negara sebesar satu persen secara global. Hal ini kemudian diperkuat dengan data akhir BNN tentang kerugian negara akibat dari narkoba, kerugian ekonomi dan ataupun sosial mencapai angka Rp. 84,7 triliun, dengan rincian kerugian sosial sebesar Rp,77,4 triliun serta kerugian secara pribadi sebesar Rp.7,3 triliun. Sedangkan di Malaysia pemerintah telah banyak menghabiskan dana untuk melakukan upaya penanganan kejahatan narkoba. Pihak Kerajaan Malaysia juga telah juga menghabiskan cukup besar dana untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu akibat dari pemakaian narkoba

Dalam penelitian ini akan berisi kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam menangani permasalahan peredaran narkoba di perbatasan kedua Negara pada tahun 2011 hingga 2018 melalui teori interdependensi dan konsep kerjasama bilateral yang akan menunjang poin-poin kerjasama dalam MoU yang telah di sepakati bersama untuk memberantas permasalahan narkoba di perbatasan kedua Negara ini.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori interdependensi

Interdependensi berarti saling ketergantungan antara aktor-aktor di suatu negara dengan tindakan aktor-aktor di negara lain yang menjadi rekannya, hal ini terjadi karena kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Interdependensi akan menciptakan hubungan internasional yang lebih kooperatif dan menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Aktor transnasional menjadi semakin penting dan kesejahteraan menjadi tujuan utama suatu negara.

Pada teori interdependensi kompleks Kohane dan Nye menaruh penekanan pada tiga hal, yaitu: 1) Negara bukan satu-satunya aktor, terdapat aktor transnasional sebagai pemain utama, 2) Hard power bukanlah satu-satunya instrumen yang signifikan, ekonomi dan penggunaan lembaga-lembaga internasional adalah instrumen utama, 3) kesejahteraan menggantikan keamanan sebagai tujuan utama. Meskipun militer atau hard power tidak lagi menjadi hal terpenting untuk menciptakan perdamaian dunia, teori ini lebih menyarankan penggunaan soft power. Kerjasama internasional bisa dijalin oleh aktor-aktor dalam menyelesaikan konflik, memajukan perekonomian, dan mencapai tujuan (Fitri, Renola, Rani, Jurnal Transnasional, 2013: 936).

Negara bukan merupakan aktor independen secara keseluruhan, justru negara saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tidak ada suatu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lainnya. Interdependensi memiliki asumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif. Interdependensi dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial.

Dalam interdependensi, terdapat setidaknya beberapa sektor ekonomi dan politik dalam hubungan interdependensi antar negara, yaitu sektor perdagangan, investasi, finansial dan politik. Sektor Perdagangan; merupakan sektor penting dalam memahami ketergantungan ekonomi. Hubungan ekonomi melalui perdagangan dapat berubah dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi interdependensi. Sektor investasi; kenaikan pertaruhan atau resiko aktor-aktor interdependensi akan mengalami kecenderungan untuk semakin tinggi yang disebabkan oleh berubahnya pola investasi.

Kerjasama antar negara ini akan dapat saling melengkapi kekurangan dari masing-masing negara. Dalam interdependensi, keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama berpijak pada dua hal, yakni *power*, kemampuan tawar-menawar dan rezim internasional. Hal ini dikarenakan meski dalam teorinya hubungan interdependensi mengarahkan pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi. Karena itu *power* aktor dalam hubungan interdependensi akan beragam sesuai dengan isunya. Kemudian, rezim internasional akan bertumpu pada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi-politiknya dalam mencapai kesepakatan antar mereka.

Teori Kerjasama Bilateral

Dinamika interaksi Indonesia-Malaysia sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan bekerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Interaksi antar negara baik dalam bentuk konflik atau kerja sama potensial terjadi pada negara-

negara yang berdekatan secara geografis letaknya berdekatan. Seperti Indonesia dengan Malaysia, dapat dikatakan ritme hubungan Indonesia- Malaysia cenderung naik turun atau fluktuatif.

Interdependensi juga ditopang oleh munculnya kesadaran global akan persoalan-persoalan yang muncul kepermukaan yang menegaskan bahwa negara bangsa tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan negara lain. Adanya hubungan kerjasama yang saling mempengaruhi dan memberi keuntungan bagi masing-masing negara menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia saling membutuhkan satu sama lain sebagai usaha meningkatkan kemakmuran bersama. Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama sejak lama namun tidak dipungkiri konflik juga mewarnai hubungan dua negara ini. Masalah yang timbul tentu saja memunculkan konflik antara kedua belah pihak. Kerjasama Bilateral sendiri dipakai dalam konsep sebagai keamanan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba. Wujud kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi pemberontakan perdagangan narkoba antara lain adanya kerjasama Indonesia dan Malaysia juga melakukan koordinasi bersama. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara.

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional termasuk terorisme dan perdagangan narkoba narkotika, serta memantau perbatasan bersama melalui kerjasama bertukar informasi antara pasukan polisi Indonesia dan polisi Malaysia melalui perjanjian GBC Malindo (*General Border Commitee* Malaysia-Indonesia). Perwujudan kerja sama tersebut diperkuat dengan melalui adanya penandatanganan naskah kesepahaman (MOU) GBC Malindo (*General Border Commitee* Malaysia-Indonesia) protap ke-15 oleh Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar di Kuala Lumpur pada Desember 2010.

Kerjasama Bilateral adalah konsep yang memfokus pada ancaman bahaya dari dalam negara sehingga menjadi ancaman dan bahaya bagi negara lain dimasa depan. Melalui adanya kerjasama internasional negara-negara berusaha untuk memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan politik. Terdapat dua tipe di dalam kerja sama internasional. Tipe pertama, terkait kondisi di lingkungan internasional sehingga dibutuhkan pengaturan khusus sehingga tidak akan menimbulkan ancaman pada negara-negara yang terlibat. Tipe kedua, mencakup keadaan ekonomi, sosial dan politik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap system internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama.

Secara general hubungan bilateral mengandung arti sebagai konsep interaksi hubungan kerjasama antar dua negara yang saling menguntungkan. Karena semakin tinggi tingkat ketergantungan kedua negara, maka semakin kecilnya hambatan kedua negara untuk melakukan hubungan termasuk letak geografis.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* dimana penulis berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasi Bagaimana kerjasama pemerintah Indonesia

dan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan tahun 2011-2018.

Hasil Penelitian

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan dari tahun 2011 sampai 2018 terbagi dalam Pertukaran Informasi Antara POLRI Dan PDRM dan Patroli Bersama Kedua Negara Di Perbatasan.

A. Kerjasama pengawasan di perairan perbatasan antara pasukan Gerakan Marin (PGM) dan Polisi Air POLRI.

Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi jalur masuk bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkotika ke negara ini. Beberapa diantaranya adalah melalui Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pelabuhan kecil di bagian Timur dari Malaysia sangat rawan dijadikan sebagai pintu masuk peredaran narkotika jenis sabu dari luar negeri. Khususnya Malaysia, para bandar narkotika dari Malaysia terus berupaya memasukan narkotika jenis sabu-sabu melalui pelabuhan - pelabuhan kecil di perbatasan tersebut dengan menumpang kapal speedboat dan kapal-kapal nelayan. Untuk memberantas jalur peredaran narkotika, Pemerintah Indonesia melalui POLRI melakukan upaya melalui patroli bersama dengan PDRM Malaysia. Patroli bersama ini dilakukan dengan terkoordinasi di wilayah perbatasan antara kedua negara baik di darat maupun di laut. Kedua negara melakukan upaya ini untuk mengamankan perbatasan darat maupun laut sehingga terbebas dari kejahatan lintas negara, termasuk peredaran gelap narkotika.

Perwujudan kerjasama Indonesia-Malaysia terkait pengawasan perbatasan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan MoU GBC Malindo protap ke-15 pada tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada pula pertemuan antara POLRI – PDRM untuk menekan angka kejahatan transnasional di kedua Negara yang di beri nama ‘*Maritime Border Coordinating Group (MBPCG)*’ pada tahun 2017. Hasil kegiatan MBPCG tersebut adalah meningkatkan patroli perairan untuk memberantas kejahatan transnasional di kedua negara salah satunya ialah peredaran narkotika. Polis Marin PDRM juga akan melakukan pertukaran informasi dengan Polairud POLRI terkait dengan isu di perbatasan di kedua negara. Selain pertukaran informasi kedua Negara juga menjalani latihan gabungan yang bernama ‘AMAN MALINDO’.

Berbagai kegiatan MBPCG di Kalbar, yaitu pertemuan kapal patroli kepolisian dua negara di posisi yang disepakati untuk melakukan komunikasi dan tukar menukar informasi, melakukan patroli di perairan perbatasan, latihan bersama, patroli udara di kawasan perbatasan, serta kerja sama penyelidikan dan penyidikan jika diperlukan untuk penanganan suatu kasus kejahatan atau pelanggaran di perbatasan perairan. Untuk jajaran Polri melibatkan Polda Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Kalbar dan Kaltara, sementara pihak PDRM melibatkan delegasi Pasukan Polisi Marin (PPM), dan Pasukan gerakan Udara (PGU) PDRM. Pada sektor wilayah perairan, patroli bersama POLRI-PDRM dikenal dengan sebutan

"*Rendezvous*" (RV) yang dilakukan di perairan perbatasan kedua negara. Salah satunya, Polri dan Polis Diraja Malaysia, Senin 07 November 2016 melakukan pertemuan di laut. Pertemuan *rendezvous* itu berlangsung di Sungai Melayu, perairan perbatasan Malaysia dan Republik Indonesia.

Selanjutnya, patrol RV kembali dilakukan pada tahun 2016 juga. Patroli RV tersebut dilakukan di perairan perbatasan laut di Sabah, Malaysia oleh Polda Kalimantan Timur (kaltim) mewakili POLRI dan PDRM Sabah Malaysia. Patroli RV yang dilakukan dengan memantau jalur-jalur yang sering dilalui kapal-kapal kecil atau kapal nelayan antara kedua negara. Hal ini ditujukan mendeteksi jalur-jalur illegal yang selama ini digunakan sebagai jalur pelaku dalam menyelundupkan narkoba maupun barang-barang illegal dari Malaysia ke Indonesia. Berdasarkan kerjasama melalui patroli perbatasan di wilayah perairan, kedua negara menemukan bahwa banyak ditemukan jalur-jalur illegal atau jalur tikus yang menjadi pintu masuknya narkoba ke Indonesia. Hal ini dikarenakan ditutupnya jalur resmi laut antara kedua negara bagi kapal-kapal kecil maupun kapal nelayan. Koordinasi yang terjadi antara kedua negara menyimpulkan bahwa cara paling tepat untuk mengurangi atau menghilangkan jalur-jalur illegal yaitu dengan membuka kembali jalur resmi antara kedua negara.

B. *Kerjasama bidang komunikasi antara PDRM dan POLRI.*

Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerjasama POLRI dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005.

Bentuk koordinasi POLRI dan PDRM yaitu *police to police*, dimana melakukan pertukaran informasi pelaku penyelundupan narkoba. Informasi yang didapatkan pihak POLRI saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hasilnya kemudian akan diteruskan ke pihak PDRM. Hal tersebut bertujuan untuk menangkap serta mengungkap jaringan narkoba dari Malaysia. Pihak POLRI meminta bantuan PDRM (polisi setempat) untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan (jaringan narkoba ataupun bandar), kemudian meminta dilakukan penangkapan. POLRI dan PDRM juga melakukan pertukaran informasi seputar warga perbatasan yang terlibat tindak pidana narkoba. Hal ini ditunjukkan oleh Pihak Polda Kalbar yang membangun kerjasama dengan PDRM Kontinjen Sarawak Malaysia. Bentuk kerja sama tersebut salah satunya dengan melakukan tukar menukar data warga negara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba.

C. *Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan POLDA Kalimantan Timur.*

Banyaknya penyelundupan narkoba dan barang illegal lainnya di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia tepatnya di wilayah Kalbar-Sarawak dan Kaltim-Sabah sangat meresahkan kedua Negara baik dari aparat sampai masyarakatnya. tidak hanya provinsi Kalimantan Barat, peredaran narkoba melalui perbatasan di

wilayah pulau Kalimantan juga masuk lewat kota Nunukan, Kalimantan Utara yang dulunya juga termasuk di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tanggal 20 Juli 2019, POLRI juga berhasil mengungkap operasi penyelundupan narkoba di jalan raya Jelaray Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari pengungkapan itu, BNN mengamankan sebanyak 38 kilogram sabu dan menangkap satu tersangka yakni AF. Namun, BNN masih memburu satu tersangka lainnya yang melarikan diri. Berawal dari informasi tentang pengiriman narkoba dari Tawau, Malaysia tujuan Samarinda, Kaltim melalui jalur laut rute Tawau-Sebatik, Tarakan dan Tanjung Selor. Tim BNN pun mengetahui kapal penerima narkoba tersebut akan berlabuh di Tanjung Selor dan akan dipindahkan ke mobil, BNN kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan mobil tersebut di Jalan Raya Jelaray Tanjung Selor. Petugas menangkap satu tersangka inisial AF sedangkan satu orang lainnya melarikan diri. Petugas menyita sabu 38 kilogram. Hingga kini BNN masih lakukan pengembangan kasus dan pengejaran tersangka yang melarikan diri. Adapun total penangkapan tersangka sebanyak sembilan orang dan mereka dikenakan pasal Pasal 114 Ayat 2 juncto Pasal 132 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal ialah hukuman mati.

Keberhasilan tersebut berkat kerjasama kedua negara melalui BNN, POLRI, dan PDRM dalam mengembangkan dan mengungkap kasus secara utuh. Sebagian besar kerjasama yang dibangun oleh POLRI dan BNN dengan PDRM Malaysia dilakukan pada tahap pengembangan kasus. Prosedur koordinasinya yaitu dimulai dengan adanya temuan tersangka dari pengembangan kasus yang ada, apabila sindikat jaringan berada di Malaysia, maka BNN akan berkoordinasi langsung Atase POLRI di Malaysia dengan PDRM. Keberhasilan aparat Kepolisian menangkap pelaku kejahatan peredaran narkoba di berbagai titik rawan wilayah di Indonesia yang menjadi jalur masuk tidak terlepas dari kerjasama Kepolisian Indonesia dengan Malaysia. Salah satu wilayah yang sangat merasakan manfaat dari kerjasama ini adalah kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Menurut Direktur Direktorat Polisi Air Polda Kalimantan Utara, Komisaris Besar Polisi Bustomy Sanaf, keberhasilan polisi selama ini menangkap sejumlah narkoba (sabu-sabu) di Nunukan berkat kerjasama polisi Nunukan dengan polisi Sabah.

D. Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sarawak dengan POLDA Kalimantan Barat.

Disamping jalur laut, POLRI dan PDRM juga melakukan pengawasan terkoordinasi di wilayah perbatasan darat. Perbatasan di daratan menjadi salah satu jalur yang digunakan oleh jaringan internasional dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Namun wilayah perbatasan darat yang menjadi pintu masuk utama narkoba dari Malaysia ke Indonesia salah satunya adalah provinsi Kalimantan Barat.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, penyelundupan narkoba banyak terjadi di provinsi yang berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Semua barang selundupan berasal dari Malaysia, dilakukan oleh jaringan lintas negara, dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di

Kabupaten Sanggau, selain ada juga yang masuk lewat Pos Lintas Batas (PLB) Jagoi babang di Kabupaten Bengkayang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya sekedar daerah transit, melainkan juga daerah tujuan pemasaran narkoba. Kedua pihak juga membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dengan Pejabat Polis Kontinjen Sarawak tentang Pelaksanaan Bantuan Penyelidikan terhadap kasus narkoba. Koordinasi dilakukan melalui surat maupun bertemu dengan *Liasson Officer* (LO) atau Konsul Malaysia terkait dengan warga negara Malaysia yang terlibat tindak pidana narkoba di Polda Kalimantan Barat.

Patroli gabungan antara POLRI dengan PDRM di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat (Serawak) dilakukan dua kali setahun. Sepanjang tahun 2010 telah dilakukan dua kali patroli di sepanjang jalur perbatasan secara bersama-sama antara POLRI khususnya Polres Sanggau dan PDRM Malaysia. Untuk jalur yang ditelusuri adalah jalan setapak kemudian di lanjutkan ke PLB kedua negara. Sebanyak 30 personel lengkap dan diperkuat anggota Polsek Entikong dan Sekayam menggunakan kendaraan roda dua akan menelusuri jalur tradisional, mulai dari Segumun, Mongkos kemudian dijemput PDRM di Serian, Malaysia. Polres Sanggau juga melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan anggota yang berada di Pospol Segumun-Mongkos (Malaysia).

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab mudahnya pengawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ditembus bandar narkoba. Hal tersebut antara lain kurang jeli aparat maupun minimnya peralatan pendeteksian dini, oknum yang diduga bermain, hingga canggihnya modus para bandar dalam melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Akibatnya, peredaran narkoba melalui jalur darat di Kalimantan Barat masih sangat tinggi.

Pengawasan bersama kedua negara melalui patroli yang dilakukan dua kali setiap tahun masih dirasakan kurang untuk memberantas jalur masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Namun manfaat yang didapatkan adalah dengan ditemukannya persoalan yaitu masih kurangnya pos-pos resmi lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Serawak). Untuk itu, Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun beberapa pos-pos lintas batas di perbatasan Kalimantan Barat (Serawak).

Di Provinsi Kalbar tepatnya di Kabupaten Pontianak, Polri dan PDRM melakukan latihan bersama dalam mencegah berbagai tindak kejahatan di kawasan perbatasan, baik di perbatasan laut dan darat kedua negara tersebut. Polri dan PDRM melakukan latihan bersama dalam mencegah berbagai tindak kejahatan di kawasan perbatasan, baik di perbatasan laut dan darat kedua negara tersebut, di Pontianak, Kalbar. Latihan bersama ini, di gelar dalam mencegah dan memberantas terkait kejahatan lintas batas, seperti mencegah masuknya narkoba di kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia, terorisme, penyelundupan, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Ia menjelaskan, latihan bersama itu, yang paling utama adalah mencegah kejahatan lintas batas di kedua negara, baik melalui perbatasan laut, darat dan udara, yang sifatnya terkoordinasi, dalam

mencegah berbagai kejahatan, serta berbagi informasi, terkait keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

E. Kerjasama menangani tindak kriminal antara PDRM dan POLRI.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memutus jaringan narkoba dari Malaysia hingga kini masih terus dilakukan. POLRI, BNN, dan PDRM Malaysia menjadi lembaga yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan. Upaya yang pertama dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi peredaran narkotika melalui kerjasama dengan Malaysia yaitu berupa langkah memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. Upaya Pemerintah Indonesia diwujudkan melalui kerjasama POLRI dengan PDRM Malaysia yang berupa koordinasi pengembangan kasus yang ditemukan POLRI di Indonesia yang didukung oleh informasi dari pihak PDRM Malaysia. Kerjasama kepolisian kedua negara antara Indonesia – Malaysia telah memberikan banyak manfaat yang berkaitan dengan pemberantasan penyelundupan narkoba dan tindak kejahatan lainnya.

POLRI bekerjasama dengan pihak Malaysia dalam hal ini PDRM. Untuk melakukan kerjasama dalam penindakan produksi narkoba dan bahan-bahan berbahaya. Kerjasama ini diimplementasikan dalam kegiatan pengidentifikasian sindikat nasional, regional dan internasional serta semua jaringan yang ada untuk mendukung dan membantu penyelidikan yang ada di pihak POLRI maupun PDRM. Tidak hanya mengidentifikasi sindikat penyelundupan narkoba, kerjasama ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi pergerakan ahli kimia yang memproduksi narkoba dan obat-obatan berbahaya secara ilegal, dan menetapkan daftar kimiawan yang dicurigai. Setelah melalui dua tahapan tersebut, yang dilakukan POLRI dan PDRM adalah kembali melacak investigasi prekursor untuk menentukan Negara sumber dan tujuan dan berdiskusi dalam forum regional yaitu ASEANOPOL dan forum internasional, salah satunya INTERPOL untuk menyelesaikan masalah ini.

POLRI bersama PDRM melakukan kerjasama untuk memberantas penyelundupan narkoba ke wilayah Entikong Kalbar dan Sebatik di Nunukan Kaltara dengan melakukan investigasi bersama dan operasi bersama di wilayah perbatasan kedua Negara yang rawan tindak penyelundupan narkoba. Bentuk dari kegiatan investigasi bersama adalah mengidentifikasi target operasi. Kemudian merumuskan rencana operasi pengungkapan kasus penyelundupan narkoba. Ditindaklanjuti dengan pembentukan Pasukan Tugas Gabungan POLRI-PDRM. Dimana ketika telah terbentuk pasukan tugas gabungan ini, ditentukanlah pendanaan operasi yang akan dilakukan. Lalu, dirumuskan dan penerapan Prosedur Operasi Standar (SOP). Pada saat telah dilakukannya operasi dari pengungkapan suatu kasus penyelundupan narkoba, tersangka akan diserahkan dan diproses tentunya proses ini sesuai dengan perjanjian ekstradisi. Kemudian, para pihak yang terlibat ini akan memberikan salinan dokumen, catatan dan barang bukti asli untuk mendukung proses penegakan hukum bagi tersangka. Proses terakhir adalah mengambil pernyataan saksi dan mengintrogasi tersangka. Sehingga diperoleh suatu informasi, jaringan sindikat penyelundupan narkoba agar jaringan ini terputus.

POLRI melakukan tindakan melalui patroli bersama dengan PDRM Malaysia. Patroli bersama di perairan perbatasan ini dilakukan secara terkoordinasi di wilayah perairan Kalbar, Kaltim dan Kaltara. Pengawasan terhadap wilayah perbatasan ini telah resmi dilakukan pada saat ditandatanganinya *Memorandum of Understanding GBC MALINDO (General Border Committee Malaysia-Indonesia)*. Polair POLDA Kalbar – Kaltim - Kaltara dan Polis Marin Malaysia telah melakukan patrol bersama atau dikenal dengan *rendezvous (RV)* antara perairan perbatasan kedua Negara. RV dilakukan dengan titik koordinat yang telah disepakati. Kepolisian kedua Negara ini sepakat untuk melakukan patroli bersama dalam mengawasi masuknya barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia. Antara Indonesia dan Malaysia yang direpresentasikan oleh POLRI dan PDRM terus melakukan pertemuan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk agar terjadinya koordinasi yang baik dalam memberantas penyelundupan narkoba. Pertemuan ini rutin dilaksanakan di perbatasan Indonesia antara perbatasan Kalbar dengan Sarawak dan juga Kaltara dengan Sabah Malaysia.

Kesimpulan

Maraknya penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dari aparat yang melakukan pengawasan di pos-pos pemeriksaan lintas batas, selain keterbatasan teknologi untuk mendeteksi barang yang diduga narkoba, jika penyelundupan dilakukan melalui jalur resmi (baik bandara maupun pelabuhan). Keberadaan titik perbatasan darat atau pun pelabuhan-pelabuhan jalur tikus di Kalbar, Kaltim, dan Kaltara sebagai pintu masuk tidak resmi dari Malaysia ke Indonesia semakin membuka peluang bagi terjadinya penyelundupan narkoba melalui kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dengan adanya kerjasama kedua negara tersebut memberikan manfaat dan berperan dalam mengurangi peredaran narkoba di Asia Tenggara. Adapun keunggulan dari hubungan kerjasama antara Indonesia – Malaysia dalam mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015* adalah dapat membantu masing-masing pihak untuk menentukan arah strategi dan kebijakan baru yang dapat dilakukan untuk selanjutnya demi terwujudnya negara Indonesia – Malaysia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara yang aman dari kejahatan narkoba, sejalan dengan agenda *Drug Free ASEAN 2015*. Selain melakukan kerjasama di tingkat ASEAN secara khusus juga dilakukan koordinasi antara Indonesia dan Malaysia dalam kerjasama bilateral, yaitu melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) - Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Badan Narkotika Nasional (BNN) – Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), yang bersepakat meningkatkan kerjasama bilateral untuk menangani kejahatan transnasional termasuk juga pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Untuk tingkat keberhasilan dari kerjasama kedua Negara dalam memberantas narkoba ini terbagi menjadi dua indikator. Pertama bisa dikatakan berhasil jika indikator yang di gunakan untuk mengukur keberhasilan kerjasama tersebut berupa penangkapan jumlah tersangka dan penangkapan jumlah barang bukti yang di lakukan oleh aparat terkait. Kedua tidak dapat dikatakan berhasil jika indikator yang digunakan ialah berupa banyaknya para pelaku kejahatan seperti Bandar, kurir, dan pemakai, dan juga narkoba yang masih ada dan beredar di lingkungan masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

Buku

May, Rudy, T (2005). "Komunikasi & Hubungan Masyarakat Internasional", Bandung: Refika Aditama.

McFarlae, John (2001). "Transnational Crime and the Asia Pacific Security, dalam *The Many Faces of Asian Security*", diedit oleh Sheldon W.Simon, Lanham and Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, Ltd.

Mueller, Gerhard O. W (1998). "Transnational Crime: Definitions and Concepts, *Transnational Organized Crime 4*".

Richard and Michael Smith, Litle (ed). (2006). "Perspective in World Politics" (Robert Keohanne, *Cooperation and International in World Politics*). New York: Routledge.

Robert, Jackson. dan Sorensen George (2013). "Pengantar Studi Hubungan Internasional:Teori dan Pendekatan". Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sumber Lain

Devi Anggraini, (2016). "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara", dalam Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3.

Fitri, Hendrini Renola. dan Faisyal Rani, (2013).. Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1.

Irdayanti, (2013). "Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam MenanganiKejahatan Transnasional", dalam Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional, Vol. 5, No. 1.

NCB-*Interpol*,(1996). "Kerjasama Internasional Dalam Bidang Kepolisian" (Jakarta: NCB-Interpol Indonesia).

John R. Wagley, (2006). "Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S. Responses" (Congressional ResearchService, The Library of Congress).

United Nations, (1975). "Changes in Forms and Dimensions of Criminality - Transnational and National", Working paperprepared by the Secretariat for the Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Toronto, Canada.

Yulizar Gafar, (2012). "Penanggulangan peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan barat – Sarawak" (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional) dalam Jurnal Nestor Magister Hukum.

Sumber Internet

Cegah kejahatan di perbatasan, Polri kerjasama dengan PDRM, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3463929/cegah-kejahatan-di-perbatasan-polri-kerja-sama-dengan-pdrm>.

Coplin, (2017). “Konsep Hubungan Bilateral”, dalam www.portalhi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-konsep-hubungan-bilateral.

Harga Mahal Buat Indonesia Jadi Sasaran Ekspor Narkotika, dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkotika> .

Inilah Penyebab Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Peredaran Gelap Narkotika, dalam <http://lampung.bnn.go.id/wp/2016/12/05/inilah-penyebab-mengapa-indonesia-menjadi-sasaran-peredaran-gelap-narkotika/>.

Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Kepada 2 Polisi Malaysia, dalam <http://news.liputan6.com/read/2288580/kapolri-anugerahkan-bintang-bhayangkara-kepada-2-polisi-malaysia?page=2>.

Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat, dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241>.

Majlis Menandatangani Prosedur Tetap (PROTAP) Malindo No. 15 PDRM-POLRI, dalam [https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-\(protap\)-malindo-no.-15-pdrm-polri](https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-(protap)-malindo-no.-15-pdrm-polri).

Narkoba Banjiri Batam, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529802/>.

Pelabuhan Kecil Rawan Peredaran Narkoba Dari Malaysia, dalam <http://www.jawapos.com/read/2016/04/17/24232/pelabuhan-kecil-rawan-peredaran-narkoba-dari-malaysia>.

Pengawasan Perbatasan Lemah, Narkoba dari Malaysia Kerap Lolos, dalam <http://www.pontianakpost.co.id/pengawasan-perbatasan-lemah-narkoba-dari-malaysia-kerap-lolos>.

Pengungkapan Narkoba di Nunukan Berkat Kerjasama Polisi Inonesia-Malaysia, dalam <http://www.antarakaltim.com/berita/17961/pengungkapan-narkoba-di-nunukan-berkat-kerjasama-polisi-inonesia-malaysia>.

Perwita & Yani, “Interdependensi”. jurnal tersedia dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/604/jbptunikompp-gdl-ristagemam-30183-10-unikom_r-i.pdf.

Polda Kalbar dan PDRM Kontijen Sarawak Bahas Bahas Penyelundupan Narkoba, dalam

http://www.rri.co.id/pontianak/post/berita/383045/daerah/polda_kalbar_dan_pdrm_kontijen_sarawak_bahas_bahas_penyelundupan_narkoba.html.

Polri-PDRM, “Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional”, dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>.

Polri dan PDRM Patroli Bersama, dalam <http://kaltara.prokal.co/read/news/7653-polri-dan-pdrm-patroli-bersama.html>.

RI, Malaysia Tingkatkan Patroli di Perbatasan, dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/233528/ri-malaysia-tingkatkan-patroli-di-perbatasan>.

Selundupkan Sabu ke Indonesia, Sindikat Malaysia Ini Pakai Jimat, dalam <http://regional.liputan6.com/read/2603752/selundupkan-sabu-ke-indonesia-sindikat-malaysia-ini-pakai-jimat>.

Stanly Ravel. (2018) . ”Menkeu: Peredaran Narkoba Ganggu Perekonomian Bangsa”, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/15271211/menkeu-peredaran-narkoba-ganggu-perekonomian-bangsa> .